



**Perjuangan PGRI dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru
di Era Reformasi Tahun 1999-2003
(Studi Kasus PGRI DKI Jakarta dan Depok)**

Nurbaity, Darmawan Rahmadi, Akhmad Syaekhu Rakhman
Pendidikan Sejarah, Universitas Indraprasta PGRI
Email: nurbaity_muthalib@yahoo.com, darmaonerahmadi@gmail.com,
a03rakhman@gmail.com

Abstract

PGRI is a place where teachers and education personnel gather. PGRI is expected to be one of the goals as a means of struggle in demanding the welfare of teachers who are still a big homework from PGRI in all branches in Indonesia. With the existence of a national education system law and a teacher and lecturer law, at least it will strengthen the role of this organization from the national, Provincial, district, and sub-district levels. With such a wide and numerous network, the PGRI organization has its roots in Indonesia. The struggle of PGRI in improving teacher welfare was further investigated, especially case studies of PGRI DKI Jakarta and Depok using the historical method. The purpose of this article is to find out how the state of teacher welfare before and after the reform era and how the steps taken by PGRI in fighting for the welfare of teachers in Jakarta and Depok. This has not seen significant results but gradually the government finally meets the demands of PGRI.

Keywords: PGRI, Teacher Welfare, DKI Jakarta, Depok

Abstrak

PGRI merupakan suatu wadah tempat berhimpunnya para guru-guru dan tenaga kependidikan. PGRI diharapkan salah satu tujuannya sebagai alat perjuangan dalam menuntut kesejahteraan guru yang masih menjadi PR besar dari PGRI di seluruh cabang di Indonesia. Dengan adanya undang - undang sistem pendidikan nasional dan undang - undang guru dan dosen setidaknya semakin menguatkan peran organisasi ini dari mulai tingkat nasional, propinsi, kabupaten, dan kecamatan. Dengan jaringannya yang begitu luas dan banyak, menjadikan organisasi PGRI mengakar di Indonesia. Perjuangan PGRI dalam meningkatkan kesejahteraan guru diteliti lebih lanjut khususnya studi kasus PGRI DKI Jakarta dan Depok dengan menggunakan metode sejarah. Tujuan artikel ini untuk mengetahui bagaimana keadaan kesejahteraan guru sebelum dan sesudah era reformasi serta bagaimana langkah-langkah yang diambil



PGRI dalam memperjuangkan kesejahteraan guru di Jakarta dan Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PGRI di era reformasi khususnya mengenai peningkatan kesejahteraan guru terus diperjuangkan walaupun di awal masa ini belum terlihat hasil yang signifikan tetapi lambat laun secara perlahan akhirnya pemerintah memenuhi tuntutan PGRI tersebut.

Kata Kunci: PGRI, Kesejahteraan Guru, DKI Jakarta, Depok

PENDAHULUAN

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), merupakan organisasi profesi guru terbesar di Indonesia. Seperti organisasi profesi lainnya, PGRI bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya dalam bidang profesinya, serta melindungi hak dan kewajiban guru sebagai anggota profesi. Selanjutnya dikatakan bahwa organisasi profesi guru ini bahkan dimasa lampau pernah menjadi kendaraan politik, yang justru menggunakan nasib guru untuk meraih cita-cita golongan politik dominan tertentu. Peranan PGRI di masa mendatang diharapkan lebih proaktif dalam memperjuangkan nasib serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru (Fitriani, 2016). Organisasi profesi ini diharapkan mampu menunjukkan citra sebagai motor penggerak dan wadah yang menampung semua aspirasi profesionalisme guru secara mandiri. Kualitas pendidikan yang rendah, akan berdampak menghambat program pembangunan peningkatan sumber daya manusia. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dari pihak PGRI guna menghasilkan sistem pendidikan yang baik dan bermutu.

Sebagai organisasi profesi guru, PGRI harus dapat menciptakan terobosan-terobosan untuk keluar dari masalah rendahnya kualitas dan profesionalisme guru. Organisasi profesi guru PGRI harus mampu menciptakan sistem pembinaan guru yang berkualitas lewat peningkatan keterampilan, pengetahuan dan wawasan tenaga pendidik. Organisasi ini



diharapkan menjadi motor bagi lahirnya ilmu pendidikan yang otonom dan inovatif, sehingga membantu pengembangan profesional profesi guru di era global ini. Organisasi profesi PGRI juga diharapkan menjadi inisiator bagi lahirnya ilmu pengetahuan pendidikan yang otonom dan inovatif, sehingga membantu pengembangan profesional profesi guru dalam menghadapi era globalisasi. Organisasi PGRI di masa mendatang dituntut untuk lebih memperjuangkan hak dan kewajiban, meningkatkan kesejahteraan, serta meningkatkan citra profesional dari para guru anggotanya (Murwaningsih, 2004).

Terbentuknya organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia adalah hasil dari perjuangan guru-guru Indonesia. Dilihat dari perjalanan sejarahnya, perjuangan kaum Guru telah dimulai dari masa Hindia Belanda dengan dibentuknya organisasi Persatuan Guru Hindia Belanda pada tahun 1912. Persatuan Guru Hindia Belanda kemudian mengalami perubahan menjadi Persatuan Guru Indonesia pada tahun 1932. Pada tanggal 23-25 November 1945 diadakan kongres Guru, yang menghasilkan Persatuan Guru Republik Indonesia. Dalam situasi perjuangan rakyat melawan Sekutu, guru-guru mengadakan kongres yang dilaksanakan dari tanggal 23 sampai 25 November 1945. Hasil kongres tersebut adalah guru-guru sepakat untuk membentuk suatu organisasi yang bisa mewadahi aspirasi dan perjuangan guru untuk kemajuan bangsa Indonesia yang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Setelah terbentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Persatuan Guru Republik Indonesia terus berjuang menggalang persatuan dengan mengajak guru-guru di daerah untuk bergabung ke dalam PGRI (Kosasih, 2016).

Organisasi PGRI merupakan organisasi yang bisa dikatakan tua secara umur, karena berdirinya satu bulan setelah Indonesia memproklamkan diri sebagai bangsa yang merdeka yakni pada bulan



November 1945 (PGRI, tt: 42). PGRI merupakan suatu wadah tempat berhimpunnya para guru-guru dan tenaga kependidikan sebagai organisasi profesi, perjuangan dan ketenaga kerjaan yang selalu memperjuangkan kesejahteraan guru, memberikan perlindungan terhadap guru, dan meningkatkan sumber daya manusia guru.

Sebagai wadah persatuan guru, PGRI diharapkan menjadi pemersatu guru, sebagai wadah penyalur aspirasi kepentingan guru, sebagai alat perjuangan dalam menuntut kesejahteraan dan sebagai lembaga yang diharapkan mampu melindungi kepentingan guru dalam ranah advokasi hukum diseluruh tanah air Indonesia. Dengan adanya undang - undang sistem pendidikan nasional dan undang - undang guru dan dosen setidaknya semakin menguatkan peran organisasi ini dari mulai tingkat nasional, propinsi, kabupaten, dan kecamatan. Dengan jaringannya yang begitu luas dan banyak, menjadikan organisasi PGRI mengakar di Indonesia.

Dalam perjalanannya, PGRI menghadapi permasalahan kesejahteraan tenaga pendidik. Pada awal Januari tahun 1998 muncul pembahasan dalam media cetak mengenai masalah dunia pendidikan di Indonesia yang disoroti oleh Komisi VII DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) karena rendahnya mutu tenaga pendidikan atau guru dan hal itu disebabkan oleh faktor mengentalnya konsentrasi guru pada masalah kesejahteraannya sehingga mengurangi konsentrasi pada peranannya sebagai tenaga pendidik. Kemudian pada pembukaan Kongres Nasional PGRI tanggal 26 November 1998 muncul tuntutan dalam bentuk aksi demonstrasi dari mahasiswa IKIP daerah Jakarta, Bandung dan Padang yang menginginkan PGRI sebagai satu - satunya organisasi para guru dibubarkan, karena dipandang PGRI tidak pernah memperjuangkan nasib guru secara riil dan lebih memosisikan dirinya sebagai kendaraan politik Golkar, sedangkan tuntutan lainnya ialah



dinaikkannya alokasi dana APBN untuk kepentingan pendidikan (Hastantyo, 2019).

Pendapat tentang nasib guru juga datang dari internal PGRI itu sendiri, yakni Sumardika selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah PGRI (DPD PGRI) Riau dalam Kongres ke – 18 di Lembang, Jawa Barat yang menyatakan ada 19 Provinsi menyampaikan pandangan terhadap Ketua Umum PGRI Basyuni Suriamiharja tentang problematika yang menjadi urgensi didalam PGRI, jika harapan para guru untuk mendapatkan kenaikan kesejahteraan (gaji) tak terealisasi maka dalam keadaan ini guru bisa mengancam mogok. Moh. Surya selaku Ketua Umum PGRI periode 1998–2003 mengakui permasalahan guru karena menurutnya selama ini guru lebih banyak diperlakukan sebagai objek administratif dan birokratis yang terlihat pada posisi guru banyak yang dijadikan bahan objek kepentingan politik, kepentingan pribadi, kekuasaan dan bisnis oleh pihak lain (Hastantyo, 2019).

Perwujudan peran PGRI dalam mengupayakan kesejahteraan guru diantaranya melalui Undang-undang Guru dan Dosen Sebagai Harapan Para Tenaga Pendidik. Wacana mengenai perlindungan terhadap kesejahteraan guru memang telah menjadi isu publik sejak tahun 1980an, dengan berjalannya kondisi sosial pasca reformasi menguatkan kembali wacana tentang perlindungan terhadap ekonomi guru. Menguatnya wacana perlindungan guru juga dikemukakan oleh Moh. Surya selaku Ketua Umum PGRI setelah membaca hasil keputusan Kongres ke-18 tahun 1998 yang mendesak pemerintah segera membuat UU perlindungan terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya dan juga menuntut pemerintah membuat UU tentang sistem penggajian guru dan tunjangan lainnya sesuai dengan harkat dan martabat guru, serta UU tentang sistem rekrutmen pendidikan, pengangkatan, penempatan dan pembinaan karier profesi guru (Hastantyo, 2019).



Dukungan terhadap wacana itu juga dibahas kedalam Konpus (Konferensi Pusat) ke - 1 PGRI masa bakti ke - 18 tahun 1999 yang dihadiri oleh peserta dari 26 Provinsi insi menguatkan dukungannya untuk melakukan tuntutan terhadap pemerintah untuk merealisasikan UU pokok tentang guru sekaligus dengan desakkan kepada pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan sebesar 25 persen dari APBN, dan secara politis peserta kongres mempersoalkan pemisahan anggota PGRI dari Korpri atas dasar selama perjalanannya iuran untuk Korpri menghambat PGRI dalam menarik iuran dari anggota. Pembahasan mengenai RUU perlindungan guru baru mulai diterima dan dibahas oleh lembaga legislatif yakni DPR dalam rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 Mei 2005 yang dipimpin oleh Zainal Maarif sebagai Wakil Ketua DPR, dalam pembahasan itu muncul usulan inisiatif mengenai RUU tentang guru dan dosen yang output kedepannya guru dan dosen ditarik kembali sebagai pegawai pusat, bukan pegawai daerah, hingga pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2005 pada 30 Desember 2005, yang tertulis dari bagian kedua tentang hak dan kewajiban guru pada pasal 14 ayat 1 dinyatakan, memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, dan memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan (Hastantyo, 2019). Permasalahan mengenai kesejahteraan guru ini juga mewarnai PGRI cabang DKI Jakarta dan Depok. Oleh karena itu dalam kaitannya tersebut akan dibahas dalam penelitian ini tentang perjuangan PGRI DKI Jakarta dan Depok dalam meningkatkan kesejahteraan guru di era reformasi (1999-2003).

Pengalaman-pengalaman yang terjadi pada periode Orde Baru menuai hasil tersendiri dan terbuka secara luas dampaknya terkait citra guru dan PGRI dihadapan masyarakat dengan adanya periode reformasi



1998. Penelitian ini begitu menarik untuk dikaji sehingga penentuan periode dalam penelitian ini ditarik dari tahun 1999 yang mana ditahun ini PGRI dibawah kepemimpinan M. Surya memperjuangkan kesejahteraan guru sudah mulai didengar dan diterima oleh pemerintah era reformasi dibanding kepemimpinan sebelum M. Surya. Penelitian berakhir ditahun 2003 karena PGRI mulai dilibatkan dalam rapat dengar pendapat bersama DPR.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Seperti yang dikemukakan oleh Gottschalk dalam (Santosa & Kurnia, 2021), bahwa metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan sejarah pada masa lalu. Metode penelitian sejarah terdiri atas empat langkah, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk menjelaskan tentang perjuangan PGRI dalam mensejahterakan guru di DKI Jakarta dan Depok dengan menggunakan sumber-sumber dari buku yang ditulis oleh Tim dari PGRI dan wawancara dengan guru-guru sekolah di Jakarta dan Depok.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjuangan PGRI Masa Reformasi

Setelah era Orde Baru berakhir, Indonesia memasuki babak baru yaitu era Reformasi. Reformasi disuarakan secara terorganisir oleh komponen mahasiswa yang didukung kalangan akademisi dan komponen lainnya telah melayangkan banyak tuntutan terhadap pemerintah demi terciptanya Indonesia yang lebih baik (Gede Agung, 2014: 330). Pada awalnya tuntutan dari segenap masyarakat tidak diindahkan dan mengakibatkan gelombang protes terus berlangsung. Kerusuhan 13 Mei di Jakarta dan Solo merupakan puncak dari rangkaian konflik terpendam



di antara berbagai komponen masyarakat. Kondisi tersebut semakin memperkuat tekanan dari dalam dan luar negeri terhadap pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998 euphoria masa meledak ketika Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya. Sesaat setelah pengunduran diri tersebut Wakil Presiden BJ Habibie dilantik menjadi presiden baru Indonesia. Proses transisi kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden BJ Habibie waktu itu sempat menimbulkan perdebatan, namun Yusril Ihza Mahendra adalah satu yang pertama menyatakan bahwa proses pengalihan kekuasaan adalah sah dan konstitusional (Prof. Dr. H. Nur Syam, n.d.).

Arus semangat reformasi melanda negeri. Perubahan situasi politik masa itu turut memengaruhi arah perjuangan organisasi. Di masa awal reformasi, PGRI menghadapi tantangan dalam lingkup global, nasional, dan organisasional. Tantangan global, khususnya di abad ke-21 yang ditandai dengan berbagai perubahan yang berlangsung cepat terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala dampaknya. Lingkungan yang sedang berubah secara global memerlukan pola kerja dalam bentuk kerja tim; memerlukan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); masyarakat lebih menghargai prestasi daripada status dan asal-usul; dan menghormati orang yang mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan produktif.

Perjuangan PGRI dalam Mengangkat Kesejahteraan Guru

Pada tahun 1999, PB PGRI telah melaksanakan advokasi kepada presiden BJ. Habibie dan DPR RI dalam memperjuangkan tambahan tunjangan penghasilan pegawai negeri dari pemerintah. Apa yang dilakukan dan diadvokasikan oleh PB PGRI telah membuahkan hasil dan pemerintah menerima usulan tambahan tunjangan kepada pegawai negeri sebesar seratus lima puluh ribu rupiah (Tim PB, 2008: xxii). Peralihan rezim seperti ini telah merubah atmosfir dalam lingkup



pemerintahan RI ke arah yang lebih positif. Masyarakat Indonesia pada era ini tidak ragu-ragu untuk berpendapat. Ada suasana baru yang menunjukkan munculnya kebebasan pers, akademis, berorganisasi, dan lain sebagainya (Winters. 1999: 86).

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan digantikannya dengan era reformasi telah membawa suatu angin segar bagi guru di Indonesia secara umum dan di Jakarta secara khusus. Tepatnya pada tanggal 17 Mei 2000 terjadi perundingan antara PGRI, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Keuangan, dan BAPPENAS yang menyepakati tuntutan dari PGRI mengenai kenaikan gaji guru 300% dari gaji yang ditetapkan saat itu, namun pada kenyataannya pemerintah hanya memberikan kenaikan 10% saja. Hal ini mengakibatkan di tanggal 18 Mei 2000 telah terjadi pengerahan massa PGRI Jawa Barat secara besar-besaran di Jakarta yang berpusat di gedung DPR RI. Sebelumnya telah ada pergerakan demo guru DKI Jakarta dan pengerahan demo guru ke Istana Presiden dari Jawa Tengah yang berdampak pada pemerintah mengkritisi PGRI. Hal ini tentu menjadi tekanan tersendiri bagi PGRI sehingga dibentuklah Komite Perjuangan Perbaikan Kesejahteraan Guru (KP2KG) (Yunus, dkk. 2003: 110-111).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru SMA Negeri di Jakarta yakni ibu Tini Suhartini yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 19.00, beliau menyatakan bahwa di era pemerintahan Orde Baru profesi guru kurang mendapatkan kesejahteraan dalam hal penghasilan dan tunjangan. Di era ini bahkan guru belum mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) di setiap perayaan hari besar agama. Kebanyakan guru mencari pekerjaan tambahan dan honor tambahan melalui pekerjaan sampingannya, seperti misalnya menjadi komite sekolah atau mengajar di tempat lain. Selama periode orde baru, pemerintah kurang memperhatikan tunjangan-tunjangan pada guru serta



pada saat itu belum ada yang namanya sertifikasi guru. Sertifikasi guru baru ada ketika era reformasi di tahun 2005 dengan hadirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang di dalamnya termuat mengenai kesejahteraan dan sertifikasi guru. Adapun peranan PGRI di sini adalah mengupayakan kepada pemerintah agar terwujudnya tunjangan profesi serta pemberlakuan sertifikasi pada guru demi tercapainya kesejahteraan guru (Tini, Wawancara, 1 Agustus 2021).

Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Tini, wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu guru di DKI Jakarta yakni Bapak Edi Sukmadi, guru SMA N 81 Jakarta menyatakan hal yang sama pula. Bahwa ketika beliau baru menjadi guru pada tahun 1996, kondisi guru pada saat itu tidak diperhatikan secara finansial. Kondisi guru pada saat itu memprihatinkan, beliau pada saat itu harus mengajar lebih dari satu sekolah. Kondisi yang dirasakan hanya mendapat gaji saja membuat beliau harus mengajar sampai tiga sekolah karena gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Setelah era reformasi bergulir, beliau menyatakan bahwa ada perbaikan terhadap nasib guru. Beliau yang juga menjadi anggota PGRI, menyatakan bahwa PGRI konsen terhadap pendidikan dengan memperjuangkan kesejahteraan guru. Lanjutnya, beliau menyatakan PGRI bersama pemerintah dan DPR pada saat itu duduk bersama membahas kesejahteraan guru yang mana PGRI dan elemen lainnya mengajukan hal tentang perbaikan kesejahteraan guru. Dengan proses yang cukup panjang akhirnya, tuntutan tersebut dikabulkan dengan disyahkannya Undang-undang Guru dan Dosen pada tahun 2005. Pengejawantahan dari UU tersebut mengenai kesejahteraan guru adalah dengan diadakannya sertifikasi guru yang berujung nantinya pada pemberian tunjangan kepada guru berupa tunjangan profesi. Katanya pula, peningkatan kesejahteraan ini melalui pemberian tunjangan oleh pemerintah dilalui secara bertahap diantaranya dengan



mengumpulkan portofolio (penilaian kinerja guru) yang apabila lolos penilaian ini seorang guru akan diberi sertifikat. Ketika penilaian secara portofolio tidak berhasil maka seorang guru harus mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pelatihan-pelatihan lainnya. Pak Edi juga menyatakan bahwa guru lebih sejahtera karena ada program sertifikasi ini. Selanjutnya peningkatan kesejahteraan guru juga diperoleh dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diberikan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang syarat di dalamnya untuk memperoleh TKD ini seorang guru harus tersertifikasi (Edi Sukmadi, Wawancara, 1 Agustus 2021).

Wawancara berikutnya dengan Ibu guru Harti Kasidjah yang merupakan seorang guru di SMA N 1 Depok yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021 pukul 15.00. Beliau mengatakan, bahwa sebelum ada tunjangan profesi guru atau ketika masa orde baru berlangsung, profesi guru dipandang sebelah mata. Pada saat itu banyak yang tidak mau menjadi guru. Setelah era reformasi bergulir, baru kemudian ada perubahan terutama dalam hal kesejahteraan yakni ketika era Gusdur terjadi peningkatan gaji yang berlipat.

Wawancara berikutnya dengan seorang guru yang bernama Supandi, S.Ag yang merupakan guru dari SMA Bunda Kandung Jakarta. Wawancara ini dilaksanakan pada 10 Agustus 2021 pukul 10.00. Dalam wawancara itu banyak hal yang beliau sampaikan antara lain: ketika masa Orde Baru, masa itu beliau hanya dapat transport saja dari pihak yayasan atau sekolah tempat mengajar dan belum adanya bantuan dari pemerintah. Katanya pula, rata-rata guru zaman ini tingkat kesejahteraannya masih kurang/minim terutama guru swasta, dari pemerintah orde baru kesejahteraan dulu sangat minim tidak seperti sekarang. Tahun 1998 awal reformasi guru masih sama seperti zaman orde baru masih minim tingkat kesejahteraan. Keadaan kesejahteraan

guru ketika masa orde baru waktu itu belum sejahtera terutama guru honorer swasta dan belum merata. Beliau juga mengatakan tentang PGRI bahwa, sejauh ini berkaitan dengan PGRI DKI sangat memberikan keuntungan karena bisa memperhatikan guru yang honorer yang di sekolah swasta yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan. PGRI DKI Jakarta ini adalah kerukunan antara guru swasta sangat erat kemudian kerja samanya juga sangat erat. PGRI Provinsi DKI Jakarta membantu para Guru di DKI Jakarta dalam memperjuangkan kesejahteraan Guru, sangat memperjuangkan kesejahteraan guru dan hasilnya saat ini sangat membantu kesejahteraan untuk guru swasta terutama yang honorer seperti adanya dana hibah yang diberikan setiap tiga bulan sekali sekitar satu juta lima ratus ribu rupiah untuk para guru swasta di Provinsi DKI. Beliau juga menyebutkan hal-hal yang dilakukan oleh PGRI Provinsi DKI Jakarta dalam memperjuangkan kesejahteraan guru antara lain:

- a. Bagi guru DKI yang memiliki kartu anggota PGRI ada dispensasi untuk ke tempat pariwisata dengan adanya potongan harga
- b. Perjuangan kesejahteraan untuk para guru swasta terutama guru honorer yaitu dengan berhasilnya pemberian dana hibah untuk guru-guru swasta yang diberikan sekitar tiga bulan sekali sekitar satu juta lima ratus ribu rupiah.

Wawancara berikutnya dengan salah satu guru swasta di Depok yaitu Bapak Santoso yang merupakan guru di SMA Tadika Pertiwi. Beliau mengatakan bahwa ketika masa orde baru dan di awal reformasi guru-guru swasta tidak diperhatikan terutama masalah kesejahteraannya. Setelah ada UU guru dan Dosen tahun 2005 barulah tingkat kesejahteraan guru meningkat dalam arti disamakan antara guru swasta dan negeri. Beliau juga mengatakan tentang peran PGRI cabang Depok, yaitu sangat berperan menyuarakan kesejahteraan guru yang disuarakan



ketika berlangsungnya dialog pendapat dengan Dewan Kota Depok dan PemProvinsi Depok.

Pada tahun 2001, pemerintah mengeluarkan Keppres 64/2001 mengenai kenaikan gaji dan kenaikan tunjangan pendidikan berdasarkan edaran Dirjen Anggaran No: SE 337A/2000 dan memberikan bantuan bagi guru swasta senilai Rp. 500 miliar, serta di tahun itu PGRI mulai mengajukan kepada pemerintah mengenai Undang-Undang tentang Guru. Di tahun 2002, Pengurus Besar (PB) PGRI meminta pemerintah agar segera merealisasikan tuntutan di tahun sebelumnya serta mendesak MPR agar alokasi anggaran pendidikan dinaikkan menjadi 25% dari APBN, walau akhirnya MPR hanya merealisasikan 20% saja (Yunus, dkk. 2003:117)

Di rentang tahun 2003 hingga 2005 telah terjadi dinamika yang cukup menarik terkait pergerakan dan perjuangan PGRI. Di tahun 2003, hal mendasar yang menjadi awal dari perjuangan guru adalah dengan lahirnya Undang-Undang 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi awal dari adanya reformasi dalam dunia pendidikan. Kemudian di tahun 2004 hingga 2005 perjuangan PGRI adalah perihal penerbitan aturan mengenai guru itu sendiri yang di dalamnya memuat kualifikasi guru, kompetensi guru, kesejahteraan guru, dan sertifikasi guru. Awalnya ini berupa RUU yang menjadi bahasan dari beberapa fraksi di DPR RI yang kemudian itu diterbitkan sebagai Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Yunus, dkk. 2003:147).

Perjuangan PB PGRI sejatinya merupakan usaha dalam mewujudkan kesejahteraan di lingkup PGRI khususnya guru sebagai motor utama dari organisasi tersebut. Kesejahteraan berarti keamanan, keselamatan, ketenteraman (*No Title*, n.d.). Kesejahteraan sosial dapat terdefiniskan dari beberapa dimensi, di antaranya kesejahteraan sosial

sebagai kondisi, kesejahteraan sosial sebagai kegiatan, dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu. Selanjutnya, kesejahteraan guru adalah pemberian kemakmuran hidup kepada orang yang bekerja di lingkungan pendidikan, baik berupa material maupun non material sehingga terpenuhi kehidupan yang layak dan lebih baik sebagai timbal balik atau balas jasa dari tanggung jawab yang dipikulnya. Pemenuhan kesejahteraan yang memadai bagi guru akan menambah semangat dalam pekerjaannya.

Selain untuk kepentingan kesejahteraan guru, PGRI juga berusaha meningkatkan kualitas guru dalam menghadapi kemajuan teknologi. Memasuki awal abad ke-21 yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi di segala bidang, terjadi perubahan cara dan banyak inovasi bermunculan. Paradigma pendidikan nasional abad 21 yang meliputi: (1) pendidikan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dengan keseimbangan yang wajar; (2) pendidikan harus dibarengi dengan penanaman sikap-sikap luhur; (3) pendidikan setiap jenjang harus memenuhi *frontliner* ilmu; (4) perlu ditanamkan jiwa kemandirian; (5) perlu konvergensi ilmu; (6) perlu memperhatikan aspek kebhinekaan; (7) pendidikan untuk semua; (8) perlu monitoring dan evaluasi pendidikan (BSNP, 2010). Pendidikan dan tujuan pendidikan abad ke-21 akan sangat dipengaruhi oleh guru dan bagaimana profesi guru dihargai dan dipandang.

Secara struktural dan fungsional, arah perjuangan PGRI mulai bergerak ke arah profesi yang modern dengan mentransformasi PGRI menjadi kekuatan moral intelektual dengan tidak meninggalkan tujuan perjuangan sebagai organisasi perjuangan dan ketenagakerjaan. Modernisasi organisasi sesuai kebutuhan dilakukan antara lain dengan membentuk alat perangkat kelengkapan organisasi sesuai kebutuhan seperti PGRI *Smart Learning and Character Center* (PGRI SLCC), Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan, dan kini tengah digagas Pusat



Pengembangan Profesi Pendidik. Hadirnya PGRI SLCC menunjukkan keseriusan PGRI dalam upaya meningkatkan kompetensi guru di bidang teknologi (Prawiro & Parera, 1998).

Adanya masukan dan peran dari PGRI akan berdampak pada pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apa yang diperjuangkan bukan semata-mata untuk kepentingan guru di masa itu saja, melainkan akan berdampak juga pada kelangsungan kehidupan di masa yang akan datang. Perjuangan yang dilakukan oleh PGRI Provinsi DKI Jakarta masih belum selesai karena target guru bersertifikat pendidik yang dicanangkan hingga tahun 2015 belum terpenuhi. Salah satu kendalanya adalah proses untuk mendapatkan sertifikat pendidik dirasa cukup sulit dan beberapa kali pemerintah mengganti cara perolehan sertifikat pendidik, hal inilah yang masih menjadi perjuangan yang terus dikawal dan disuarakan oleh PGRI Provinsi DKI Jakarta untuk guru-guru SMA di Jakarta.

KESIMPULAN

Sejarah PGRI diawal terbentuknya hingga perjuangannya sampai saat ini terus memperhatikan kepentingan guru terutama masalah kesejateraan. Perjuangan PGRI sama halnya berjuang untuk memajukan bangsa ini. Guru merupakan tonggak dari pendidikan dan sosok yang berada di garda terdepan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena pentingnya peran guru tersebut, maka sesuatu yang terkait untuk kepentingan guru sejatinya sangat perlu diperhatikan. Perjuangan PGRI mengalami pasang surut sesuai dengan corak pemerintahan yang berlaku pada masanya. Ketika masa orde baru berdasarkan data, para guru mengatakan profesi guru pada saat itu dipandang sebelah mata, disepelekan. Tingkat kesejahteraan tidak diperhatikan. Masa terus bergulir, ketika era reformasi tiba, di awal



keberlangsungannya, masalah guru dan kesejahteraannya belum langsung dipikirkan. Lambat laun dalam era ini, berdasarkan perjuangan PGRI yang menyuarkan ke pemerintah, salah satu hal yang diangkat yaitu masalah kesejahteraan sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih baik dan semakin baik. Masalah kesejahteraan terus diperjuangkan dan dikawal oleh PGRI agar pelaksanaan pencairannya benar-benar terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

BSNP. (2010). No Title.

Fitriani, F. (2016). PERANAN PGRI DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU DI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 60–63.

Hastantyo, G. (2019). PASANG SURUT PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) PASCA REFORMASI TAHUN 1998-2005 di JAWA TIMUR. *Repository STKIP PGRI Sidoarjo*.

Kosasih, A. (2016). Perjuangan Organisasi Guru di Masa Revolusi Sejarah PGRI di Awal Pendiannya. *Sosio E-Kons*, 8(2).

Murwaningsih, T. (2004). PERANAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) DALAM UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU. *Jurnal Ilmiah Guru Caraka Olah Pikir Edukatif*, 8(01).

No Title. (n.d.).

Prawiro, R., & Parera, F. M. (1998). *Pergulatan Indonesia membangun ekonomi: pragmatisme dalam aksi*. Elex Media Komputindo.

Prof. Dr. H. Nur Syam, M. S. (n.d.). *No Title*.

Santosa, Y. B. P., & Kurnia, R. (2021). Kontribusi Ki Bagus Hadikusumo dalam Sidang BPUPKI Mei-Juli 1945. *CHRONOLOGIA*, 2(3), 1–20.